

	News Title : Penuhi Permintaan DPR, Kemendag Luncurkan Call Center Lini Bappebti untuk Akomodasi Korban Robot Trading	
	Media Name : voi.id	Journalist : Mery Handayani
	Publish Date : 24 June 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI DPR)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Lini Bappebti

Home > Ekonomi

Penuhi Permintaan DPR, Kemendag Luncurkan Call Center Lini Bappebti untuk Akomodasi Korban *Robot Trading*

24 Jun 2022 13:44 | Tim Redaksi ▾



Ilustrasi. (Foto: Dok. Antara)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan resmi membuka pusat bantuan (*call center*) dengan pendekatan baru bernama Lini Bappebti atau Layanan Informasi Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Melalui layanan ini, Bappebti akan mempermudah pengaduan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi perdagangan berjangka komoditas (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan layanan Pusat Bantuan Lini Bappebti menyediakan empat saluran telepon dengan nomor 021-2301665, 021-2301654, 021-2301645, dan 021-2301663. Pusat Bantuan Lini Bappebti akan beroperasi setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

"Kami berharap ini menjadi solusi berbagai pihak dan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait dengan Bappebti, sebab aksesnya cukup mudah hanya melalui sambungan telepon," ujarnya, dikutip Jumat, 24 Juni.

Jerry menjelaskan, perkembangan dunia usaha terutama di bidang PBK, baik itu pertumbuhan transaksi, perkembangan komoditas yang diperdagangkan, sampai dengan pertumbuhan pelanggan atau nasabah yang sangat pesat, hal ini menuntut adanya pelayanan informasi yang lebih cepat dan mudah.

Kata Jerry, hal tersebut salah satunya terlihat dari besarnya jumlah pelanggan yang terdaftar untuk perdagangan fisik aset kripto per Mei 2022 yaitu 14,1 juta pelanggan.

"Jumlah yang luar biasa banyak ini tentunya memerlukan saluran komunikasi dua arah yang dapat menjadi sarana tepat untuk masyarakat berkonsultasi langsung dengan Bappebti. Komunikasi yang baik antara Bappebti dengan masyarakat juga bertujuan agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif," jelasnya.

Selain penyediaan informasi, Jerry berharap sarana *call center* juga dapat menampung masukan, kritik, dan saran yang membangun dari masyarakat baik yang terlibat langsung dalam industri PBK, SRG, dan PLK maupun masyarakat lain yang peduli dengan perkembangan industri ini.

Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menuturkan, Pusat Bantuan Lini Bappebti merupakan bentuk tanggung jawab Bappebti menyediakan sarana pengaduan dan permohonan informasi bagi masyarakat.

Kata Didid, hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan Komisi VI DPR RI pada 25 Mei 2022 lalu, yaitu Bappebti agar segera menyediakan layanan pusat bantuan bagi masyarakat. Hal itu khususnya untuk mengakomodasi para korban praktik perdagangan menggunakan *robot trading* dan PBK pada umumnya.

"Lini Bappebti merupakan perluasan layanan Bappebti yang sebelumnya merupakan saluran pengaduan nasabah pialang berjangka komoditas," tegasnya.

Untuk penyampaian informasi yang lebih luas dan lengkap, kata Didid, masyarakat juga dapat menyampaikannya melalui e-mail humas.bappebti@kemendag.go.id.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mendesak Badan Pengawas Komoditi Berjangka (Bappebti) untuk membangun *call center* atau pusat pengaduan agar masyarakat yang menjadi korban *robot trading* dapat menyampaikan keluhan kesahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memberikan tenggat waktu bagi Bappebti untuk menyediakan pusat pengaduan masyarakat baik secara *on-site* maupun *online* selambat-lambatnya 30 hari ke depan.

"Komisi VI meminta Bappebti untuk membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara *on-site* maupun *online* atau *call center* dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi. Termasuk pelarangan penjualan langsung atau *direct selling* dalam *marketplace*," kata Martin dalam rapat Komisi VI dengan Bappebti, Rabu, 24 Mei.

"Jangan sampai nanti kita rapat lagi dengan Bappebti masih ngomongin *call center*, (tetapi) masih belum ada," sambungnya.